Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 8, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS OLEH PEMERINTAH MADIUN DALAM MENINGKATKAN AKSESBILITAS PENDIDIKAN BAGI PELAJAR

Ceria Dwi Rahmawati[1], Supri Hartono[2], Kendry Widiyanto[3]

[123] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

ceriarahmawati055@gmail.com
suprihartono@untag-sby.ac.id
kenronggo@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pelajar. Program ini bertujuan mengatasi kendala geografis dan ekonomi yang sering menyebabkan putusnya sekolah, khususnya di daerah terpencil. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, serta studi literatur terkait. Hasil menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan partisipasi siswa. Implementasinya meliputi seleksi penerima berdasarkan kriteria jarak dan ekonomi, penyediaan armada bus, serta pengawasan keselamatan. Meskipun efektif, tantangan seperti keterbatasan armada dan cuaca buruk perlu diatasi melalui inovasi teknologi dan alokasi anggaran yang lebih besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ini mendukung kesetaraan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan SDGs, serta menjadi model bagi daerah lain.

Kata kunci: implementasi program, angkutan sekolah gratis, aksesibilitas pendidikan, Pemerintah Madiun, pelajar.

A B S T R A C T

This study analyzes the implementation of the Free School Transportation Program by the Madiun City Government to improve educational accessibility for students. The program aims to address geographic and economic barriers that often lead to school dropout, particularly in remote areas. Using a qualitative descriptive approach, this study collected data through interviews, observations, and document analysis from the Madiun City Education Office, as well as a review of related literature. Implementation included selecting recipients based on distance and economic criteria, providing a bus fleet, and safety monitoring. While effective, challenges such as fleet limitations and inclement weather need to be addressed through technological innovation and increased budget allocation. This study concludes that the program supports educational equality in accordance with the National Education System Law and the SDGs and serves as a model for other regions.

Keywords: program implementation, free school transportation, educational accessibility, Madiun Government, students.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

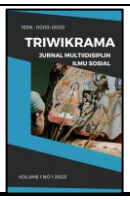
1. PENDAHULUAN

Transportasi menurut (Farida & Maulana, 2023) merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Dalam konteks modernisasi dan urbanisasi yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan sistem transportasi yang memadai menjadi semakin mendesak. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin padatnya permukiman di wilayah perkotaan maupun pinggiran, kebutuhan mobilitas masyarakat pun mengalami kenaikan signifikan. Transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktifitas manusia. Transportasi dari suatu wilayah adalah sistem pergerakan manusia dan barang antara satu zona asal dan zona tujuan dalam wilayah yang bersangkutan(Muna et al., 2024). Transportasi berfungsi sebagai urat nadi yang menghubungkan berbagai sektor strategis, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertukaran informasi antarwilayah. Dengan sistem transportasi yang baik, pengalokasian sumber daya ekonomi dapat berlangsung lebih efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.Kondisi ini mendorong kebutuhan akan penyediaan jasa transportasi yang tidak hanya memadai dari segi jumlah, tetapi juga tersebar secara merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan transportasi yang adil dan merata menjadi kunci dalam menciptakan sistem mobilitas yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan(Retno Oktaviani et al., 2024).

Aksesibilitas pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan di suatu wilayah (Anwar, 2022). Kemampuan setiap individu untuk menjangkau fasilitas pendidikan secara aman, efisien, dan tanpa hambatan finansial adalah bagi terwujudnya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ketiadaan atau mahalnya akses transportasi dapat menjadi penghalang signifikan terhadap partisipasi sekolah, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas (Azkiyah et al., 2025).

Program ASG memulai operasionalnya pada 1 Februari 2019 dengan tiga armada bus sekolah, masing-masing berkapasitas 30 pelajar . Namun, kapasitas awal ini segera terbukti belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan transportasi pelajar di Kota Madiun. Oleh karena itu, pada Maret 2019, (Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2019)menggandeng 20 armada Angkutan Kota (Angkot) untuk mendukung layanan ASG, dengan setiap angkot mampu menampung 12 pelajar, terutama mereka yang rumahnya tidak terjangkau rute bus sekolah. Pada awal program, ASG baru menjangkau 330 pelajar, dengan sekitar 450 pelajar dari berbagai jenjang yang belum terkover. Pada Tahun 2023 Dishub Kota Madiun telah berhasil mengoperasikan lima unit bus khusus yang diperuntukkan bagi kebutuhan transportasi siswa secara gratis. Lima unit bus tersebut terdiri dari tiga unit bus berukuran sedang yang memiliki kapasitas angkut sekitar 25 orang per unit, serta dua unit bus berukuran kecil jenis Elf yang masing-masing mampu menampung hingga 18 pelajar. Pengadaan armada ini tidak hanya menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi, tetapi juga menjadi simbol perhatian terhadap masa depan generasi muda. Masing-masing bus dirancang untuk menyesuaikan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kebutuhan pelajar di berbagai wilayah Kota Madiun. Bus ukuran sedang digunakan untuk trayek dengan jumlah pelajar yang cukup banyak, seperti di kawasan sekolah menengah pertama dan menengah atas. Sementara itu, bus ukuran kecil sangat cocok untuk menjangkau daerah-daerah yang memiliki ruas jalan lebih sempit atau berlokasi agak terpencil namun tetap membutuhkan layanan transportasi sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Oleh Ristiawan, Dwi (2021)

Penelitian ini Berjudul: Evaluasi "Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Banyumas"(Ristiawan, 2021) Metode yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif Teori yang digunakan Van Meter dan Van Horn (Model ImplementasiKebijakan) Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu: kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta hubungan antar organisasi. Menurut mereka, interaksi dinamis antar faktor tersebut menentukan apakah kebijakan bisa terlaksana secara efektif atau tidak.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program angkutan sekolah gratis (ASG) di Kabupaten Banyumas secara komprehensif. Fokus utama adalah untuk mengetahui bagaimana program ini dijalankan, dampaknya terhadap perilaku siswa, khususnya kedisiplinan, serta pengaruhnya terhadap keselamatan siswa di jalan raya.

Penelitian oleh Putri, Ayu S. (2020)

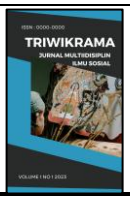
Penelitian ini Berjudul "Dampak Layanan Transportasi Sekolah Terhadap Akses Pendidikan di Daerah Perdesaan"(Putri, 2020) Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak layanan transportasi sekolah terhadap akses pendidikan khususnya di daerah perdesaan yang memiliki keterbatasan sarana transportasi. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana layanan transportasi sekolah dapat mempercepat waktu tempuh siswa ke sekolah dan bagaimana layanan ini berkontribusi dalam mengurangi beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh keluarga. Studi kasus dipilih untuk menggali secara mendalam kondisi nyata di lapangan, termasuk hambatan dan manfaat yang dirasakan oleh siswa dan keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas layanan transportasi.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Ini berarti bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi dalam masyarakat, baik dalam bentuk program, peraturan, maupun layanan. Dalam konteks ini, kebijakan publik bukan sekadar dokumen normatif, tetapi merupakan alat transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang nyata. Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau persoalan tertentu (Meutia, 2017).

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



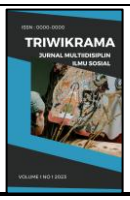
Kebijakan publik juga memiliki sifat multidimensional, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga menyentuh aspek nilai, kepentingan, dan konteks sosial-politik. Dalam konteks implementasi program ASG di Kota Madiun, kebijakan ini hadir sebagai solusi atas rendahnya akses transportasi aman dan terjangkau bagi pelajar, serta sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan (Ulfatiyana & Parwiyanto, 2021). Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi darikepentingan publik (Stia et al., 2023). Oleh karena itu tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, dan untuk itu ia harus memperhatikan terhadap masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan dantuntutan-tuntutan yang ada di lingkungannya (Herizal et al., 2020).

Administrator publik sebagai pelaku kebijakan merupakan salah satukomponen dari sistem kebijakan publik Dunn (1994 :71

Konsep Teori Kebijakan Publik:

1. Formulasi kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik, yaitu saat pemerintah mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif solusi, hingga memilih opsi kebijakan yang dianggap paling tepat untuk dijalankan. Pada tahap ini, proses perumusan kebijakan melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan publik. Tahap formulasi juga menentukan kejelasan tujuan kebijakan, arah yang ingin dicapai, serta landasan hukum atau peraturan yang mendukung.
2. Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang telah diformulasikan ke dalam tindakan nyata. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada tahap ini, kebijakan publik benar-benar diuji efektivitasnya, karena berhubungan langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat. Implementasi yang baik akan mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam kegiatan praktis yang sesuai dengan kebutuhan publik.
3. Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap kinerja kebijakan, apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam formulasi tercapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan mengukur keberhasilan, hambatan, serta dampak yang ditimbulkan kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Evaluasi kebijakan penting sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar suatu kebijakan dapat diperbaiki, direvisi, atau bahkan dihentikan jika dinilai tidak efektif. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sekaligus pembelajaran dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Analisis kebijakan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan memberikan rekomendasi berbasis data, teori, maupun metode analisis tertentu agar kebijakan publik dapat lebih efektif dan efisien. Analisis kebijakan biasanya dilakukan oleh akademisi, lembaga penelitian, maupun pihak pemerintah untuk memahami masalah publik secara mendalam, menilai alternatif kebijakan, serta merumuskan langkah strategis yang tepat. Analisis kebijakan tidak hanya dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan, tetapi juga setelah kebijakan diimplementasikan, sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif bagi pengambil keputusan.

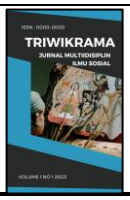
Selain faktor lingkungan kebijakan publik, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antaraktor yang terlibat. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan transparan akan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980). Dalam konteks Program ASG, komunikasi antara pemerintah daerah dengan sekolah, orang tua, serta penyedia layanan transportasi menjadi sangat penting agar kebijakan benar-benar menyentuh sasaran (Apdhi et al., 2016). Tanpa koordinasi komunikasi yang baik, program berpotensi mengalami hambatan administratif maupun teknis, seperti keterlambatan layanan atau ketidaksesuaian jadwal dengan kebutuhan pelajar.

Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat apabila diimplementasikan.Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang inginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncakan dengan baik implementasinya, maka apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Edward juga mengatakan bahwa ada 4 (empat) variable krusial dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi (Communication): Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain. Dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang merasakan keputusan mengetahuan apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



interprestasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksanaan peraturan tersebut

2. Sumber Daya (Resources) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
3. Disposisi (Disposition) : adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkanolehpembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi (BureaucraticStructure): Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspekdaristruktur organisasi adalah Standard Operating Procedure(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yangrumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, yakni ketika kebijakan yang telah dirumuskan mulai dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah program publik yang berkualitas sekalipun tidak akan berhasil mencapai tujuannya jika tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi merupakan proses yang menentukan bagaimana suatu program dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Jannah et al., 2022). Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun tidak akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Mereka mengembangkan model implementasi kebijakan yang terdiri atas enam variabel utama: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, (4) karakteristik organisasi pelaksana, (5) disposisi atau sikap pelaksana, dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Model ini secara konseptual memberikan kerangka sistematis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Husaini et al., 2023).

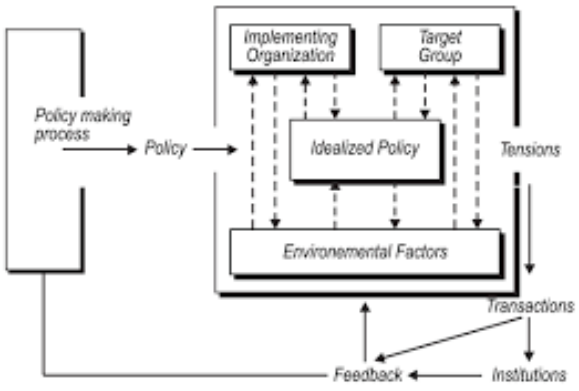
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Teori Implementasi oleh T.B. Smith

Menurut T.B. Smith (1973), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks, dinamis, dan tidak selalu berjalan secara linear. Smith berpendapat bahwa implementasi bukan hanya sekadar menjalankan keputusan atau instruksi dari pembuat kebijakan, melainkan melibatkan interaksi berbagai aktor, pengaruh struktur organisasi, komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, serta kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. T.B. Smith mengkritik pandangan tradisional tentang implementasi kebijakan yang terlalu menyederhanakan proses pelaksanaan sebagai sesuatu yang bersifat mekanistik dan linear. Menurutnya, dalam kenyataannya, kebijakan yang diterapkan seringkali mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan penyimpangan dari desain awal akibat kondisi dan tantangan di lapangan. Menurut T.B Smith bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut:

1) Idealized policy, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target groups untuk melaksanakannya.
2) Target gorups, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3) Implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
4) Inveronmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial. Ekonomi, dan politik.

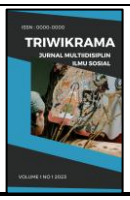
Gambar 1 Model Implementasi Tb Smith



Sumber: e-Journal Perpusnas

Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan T.B. Smith, penelitian ini berusaha menganalisis secara lebih mendalam dinamika pelaksanaan Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) di Kota Madiun. Smith menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



proses yang kompleks, penuh interaksi antaraktor, dan tidak jarang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini sangat relevan dengan konteks Program ASG yang dalam praktiknya menghadapi berbagai dinamika di lapangan.Program ASG di Kota Madiun lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih inklusif.

Keberhasilan implementasi ASG juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan stakeholder terkait. Komunikasi yang baik antara Dinas Perhubungan, pihak sekolah, orang tua, dan para pelajar menjadi kunci utama kelancaran program. Jika terjadi miskomunikasi, misalnya terkait jadwal keberangkatan bus atau rute yang dilalui, maka pelaksanaan kebijakan bisa terhambat. Dengan perspektif T.B. Smith, dengan Organisasi dalam implementasi ASG merujuk pada bagaimana struktur dan peran lembaga pelaksana dibentuk, termasuk koordinasi antar dinas terkait serta dukungan sekolah, agar program berjalan sesuai tujuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul *"Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) oleh Pemerintah Kota Madiun dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan bagi Pelajar"* adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dikaji, yakni sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan dalam konteks sosial tertentu dan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap proses, dinamika, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh, dengan menggambarkan realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian, bukan melalui angka-angka atau statistik semata, melainkan melalui narasi yang menyeluruh dan mendalam.Menurut Bogdan dan Taylor (1975), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

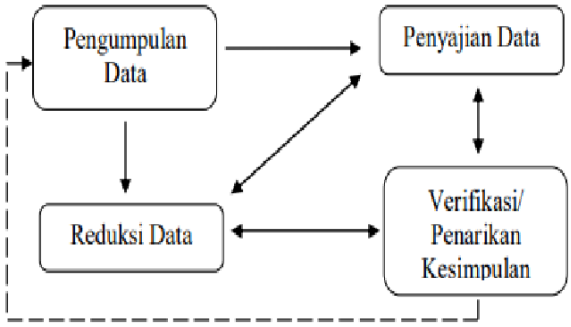
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pelajar. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna dan dinamika sosial yang terjadi dalam proses implementasi program, mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi antar instansi, hingga persepsi dari para penerima manfaat.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di beberapa instansi terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai pelaksana utama, Dinas Pendidikan sebagai mitra teknis, serta beberapa sekolah penerima layanan dan orang tua siswa sebagai informan pengguna digunakan untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Teknik Analisa Data



Adapun penjelasan metode analisis menurut Miles dan Huberman yang digunakan pada penelitian ini, yaitu diantaranya :

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini telah dilakukan dari mulai proses penelitian sampai penelitian selesai. Pada penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi secara langsung ke narasumber penelitian serta dokumen lainnya untuk memperkuat data penelitian.
2. Reduksi data Pada tahap ini, akan dilakukan proses penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan informasi yang telah diperoleh. Kemudian hasilnya akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian Data. Penyajian data atau dapat disebut display data akan menampilkan data visual dapat dalam bentuk tabel, diagram ataupun matriks. Hal tersebut bertujuan untuk membantu memahami atau menganalisis hubungan antar elemen serta memberikan gambaran secara jelas mengenai temuan-temuan baru pada penelitian.
4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan. Pada tahap verifikasi/penarikan kesimpulan akan dilakukan pengkajian kembali data yang diperoleh untuk menemukan korelasi, perbedaan atau tren yang signifikan dalam data. Hal tersebut dilakukan agar memastikan keakuratan dan keandalan interpretasi yang dihasilkan dari analisis data. Kemudian peneliti akan menyusun narasi untuk memperjelas temuan selama proses analisis untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan mengintrepretasikan makna dari data pada suatu penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

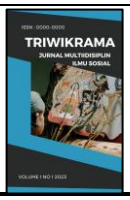
Deskripsi Objek Penelitian

Kondisi Geografis Kota Madiun

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi geografis strategis di wilayah barat Jawa Timur. Secara astronomis, Kota Madiun terletak pada koordinat antara 7°37'50" hingga 7°42'5" Lintang Selatan dan 111°31'20" hingga 111°34'40" Bujur Timur. Kota ini berada pada ketinggian rata-rata sekitar 63 hingga 75 meter di atas permukaan laut, yang

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



menjadikannya memiliki kondisi topografi yang relatif datar dengan sedikit perbukitan landai di beberapa bagian wilayahnya. Luas wilayah Kota Madiun tercatat sekitar 33,92 kilometer persegi, menjadikannya sebagai salah satu kota terkecil di Jawa Timur dari segi luas wilayah, namun memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Posisi geografis Kota Madiun sangat strategis karena berada di jalur lintas utama yang menghubungkan wilayah Jawa Timur bagian barat dengan wilayah tengah dan timur, serta menjadi penghubung antara kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo, yang masing-masing terdiri dari beberapa kelurahan.

Kondisi geografis Kota Madiun yang dikelilingi sepenuhnya oleh Kabupaten Madiun ini menciptakan hubungan saling ketergantungan yang erat antara kedua wilayah administratif tersebut, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Luas Wilayah dan Pembagian Kecamatan

Kota Madiun memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar 33,92 kilometer persegi atau 3.392 hektar. Meskipun tergolong sebagai salah satu kota terkecil dari segi luas wilayah, Kota Madiun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo.

Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kota Madiun mencapai sekitar 220.000 hingga 230.000 jiwa, yang tersebar di tiga kecamatan dan 27 kelurahan di seluruh wilayah kota. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 33,92 kilometer persegi, Kota Madiun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu mencapai sekitar 6.500 hingga 6.800 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur setelah Surabaya.

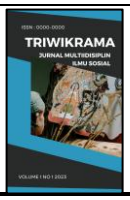
2**. Kondisi Pendidikan di Kota Madiun**

Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan Kabupaten Madiun. Ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi pendidikan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari ketersediaan sarana prasarana pendidikan, sebaran sekolah, hingga tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

1. Jumlah dan Sebaran Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)

Kabupaten Madiun memiliki 406 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di 15 kecamatan. Sekolah-sekolah dasar ini menjadi fondasi utama dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia sekolah di seluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, jumlah siswa SD pada tahun 2023 mencapai 36.370 anak, menurun dari 41.459 anak pada tahun 2019, dengan rata-rata penurunan sekitar 1.250 siswa per tahun. Penurunan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan daya tarik dan kualitas sekolah. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kabupaten Madiun memiliki 48 SMP yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah siswa SMP relatif stabil dengan rata-rata sekitar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



17.000 siswa yang masuk SMP setiap tahunnya. Sebaran sekolah SMP di setiap kecamatan memudahkan akses pendidikan menengah pertama bagi pelajar dari berbagai wilayah.

Program Angkutan Sekolah Gratis di Kota Madiun

Sebagai respons terhadap tantangan aksesibilitas pendidikan, khususnya bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kendala jarak ke sekolah, Pemerintah Kota Madiun mengimplementasikan Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG). Program ini menjadi sangat relevan mengingat kondisi geografis Kabupaten Madiun yang memiliki topografi bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan, serta sebaran 406 SD/MI dan 48 SMP/MTs yang tersebar di 15 kecamatan.

Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi bagi siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zebran Hakim (2024) terhadap pembiayaan angkutan sekolah gratis di Kota Madiun, evaluasi mendalam terhadap sistem subsidi eksisting menunjukkan perlunya optimalisasi anggaran agar efisien namun tetap menjamin aksesibilitas pendidikan.

PEMBAHASAN

Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) di Kota Madiun merupakan sebuah inovasi kebijakan publik yang diluncurkan sebagai respons terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat, khususnya pelajar, dalam mengakses layanan pendidikan. Implementasi program ini tidak dapat dilepaskan dari konteks permasalahan yang melatarbelakanginya, yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar serta kesenjangan akses transportasi menuju sekolah yang sangat mencolok. Fenomena pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka kecelakaan, dimana banyak pelajar terpaksa menggunakan sepeda motor untuk menempuh jarak yang jauh dari rumah ke sekolah karena tidak tersedianya moda transportasi yang aman, terjangkau, dan memadai. Kondisi ini diperparah oleh realitas ekonomi dimana banyak keluarga kurang mampu yang kesulitan membiayai transportasi harian anak-anak mereka, sehingga pilihan untuk menggunakan sepeda motor meskipun tanpa SIM menjadi alternatif yang dipilih meskipun berisiko tinggi. Kesenjangan akses transportasi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pelajar, tetapi juga berpotensi menghambat partisipasi pendidikan, dimana anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang berdomisili di wilayah dengan jarak tempuh jauh ke sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk absen atau bahkan putus sekolah karena hambatan transportasi.

Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) di Kota Madiun dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Thomas B. Smith. Model ini memberikan kerangka analisis yang sistematis dengan mengidentifikasi empat komponen kunci yang saling berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan, yaitu idealized policy (kebijakan yang dirancang), target groups (kelompok sasaran), implementing organization (organisasi pelaksana), dan environmental factors (faktor lingkungan).

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. Idealized Policy (Kebijakan yang Dirancang)

Komponen pertama dalam Model Smith adalah idealized policy atau kebijakan yang dirancang, yang mencakup tujuan, sasaran, dan mekanisme kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks Program ASG di Kabupaten Madiun, kebijakan ini dirancang dengan tujuan utama untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, aman, dan terjangkau bagi seluruh pelajar dari berbagai lapisan masyarakat. Menurut Smith, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa jelas dan komprehensif kebijakan tersebut dirumuskan, serta seberapa baik kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada para pelaksana dan penerima manfaat. Data penelitian menunjukkan bahwa Program ASG di Kabupaten Madiun telah memenuhi kriteria ini dengan sangat baik, terbukti dari mekanisme koordinasi lintas instansi yang terstruktur antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

2. Target Groups (Kelompok Sasaran)

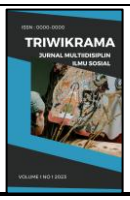
Komponen kedua dalam Model Smith adalah target groups atau kelompok sasaran, yang mencakup karakteristik, perilaku, dan respons dari individu atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Smith menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang karakteristik kelompok sasaran sangat penting karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan preferensi kelompok sasaran. Dalam konteks Program ASG di Kota Madiun, kelompok sasaran utama mencakup seluruh pelajar SD, SMP, dan SMA/sederajat, namun implementasinya lebih berdampak kepada pelajar dari keluarga menengah ke bawah dan pelajar yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas.

Data dari Kabupaten Madiun tahun 2023 menunjukkan kondisi partisipasi pendidikan yang menarik untuk dicermati (Gambar 4.3). Pada jenjang SD/MI/Sederajat, APM mencapai 99,42% dengan APK 102,92%, yang mengindikasikan bahwa hampir semua anak usia SD telah mengenyam pendidikan. Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat dengan APM 84,27% dan APK 94,48%. Penurunan paling drastis terlihat pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat, di mana APM hanya mencapai 57,56% meskipun APK-nya tinggi yakni 98,92%. Perbedaan besar antara APM dan APK pada jenjang menengah atas ini menunjukkan banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia idealnya, kemungkinan akibat putus sekolah di masa lalu atau terlambat masuk sekolah. Kondisi ini memperkuat urgensi Program ASG sebagai intervensi untuk mengatasi hambatan aksesibilitas, khususnya terkait biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

3. Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

Komponen ketiga dalam Model Smith adalah implementing organization atau organisasi pelaksana, yang mencakup struktur, kapasitas, dan koordinasi antar-instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Smith menekankan bahwa karakteristik organisasi pelaksana sangat

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena organisasi yang efektif harus memiliki struktur yang jelas, kapasitas yang memadai, dan mekanisme koordinasi yang baik antar-unit atau antar-instansi yang terlibat. Dalam konteks Program ASG di Kota Madiun, implementasi melibatkan struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan sekolah sebagai pemangku kepentingan langsung, yang menunjukkan bahwa aspek kelembagaan telah dikelola dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

4. Environmental Factors (Faktor Lingkungan)

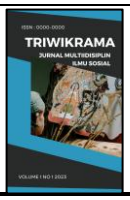
Komponen keempat dalam Model Smith adalah environmental factors atau faktor lingkungan, yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Smith menekankan bahwa kebijakan publik tidak diimplementasikan dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks lingkungan yang dinamis dan kompleks yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi. Dalam konteks Program ASG di Kabupaten Madiun, faktor lingkungan menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas program, baik dari sisi dukungan sosial masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, maupun komitmen politik pemerintah daerah.

Perbandingan dengan praktik terbaik dari daerah lain memberikan beberapa pembelajaran penting untuk pengembangan Program ASG Kabupaten Madiun ke depan. Pengalaman Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan Angkutan Cerdas Sekolah berbasis aplikasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan pengawasan program, dimana aplikasi memungkinkan siswa memantau posisi angkutan secara real-time sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di titik penjemputan, orang tua dapat memantau keberadaan anak melalui sistem tracking, dan Dinas Perhubungan dapat mengawasi kinerja sopir serta mengoptimalkan rute secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas aktual tanpa harus menempatkan petugas pengawas di setiap trayek (Kushadianto & Rosdiana, 2019).

Pengalaman Kota Surabaya yang telah mengembangkan bus sekolah gratis sejak tahun 2015 dengan terus melakukan perbaikan fasilitas mulai dari bus biasa hingga bus ber-AC, serta penambahan armada secara bertahap dan implementasi kartu bus untuk memudahkan absensi dan pemantauan siswa, menunjukkan pentingnya komitmen jangka panjang dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan program angkutan sekolah. Kota Surabaya juga telah mengintegrasikan program bus sekolah dengan sistem transportasi publik yang lebih luas sehingga terjadi sinergi antara berbagai moda transportasi dalam melayani kebutuhan mobilitas masyarakat, termasuk pelajar, mencerminkan pendekatan sistem yang holistik dalam perencanaan transportasi perkotaan (Kusuma, 2015).

Dalam konteks peningkatan Angka Partisipasi Murni yang menjadi salah satu tujuan strategis Program ASG, data menunjukkan bahwa Kota Madiun masih menghadapi tantangan serius terutama pada jenjang SMP dan SMA. APM SD/MI sudah mencapai angka tinggi yaitu 99,42% dengan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



APK 102,92%, mengindikasikan hampir seluruh anak usia SD telah mengenyam pendidikan dasar, namun terjadi penurunan signifikan pada jenjang SMP/MTs dengan APM 84,27% dan APK 94,48%, serta penurunan drastis pada jenjang SMA/SMK/MA dimana APM hanya 57,56% meskipun APK mencapai 98,92%. Perbedaan besar antara APM dan APK pada jenjang menengah ini menunjukkan banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai usia idealnya, kemungkinan akibat putus sekolah di masa lalu atau terlambat masuk sekolah, yang salah satu penyebabnya adalah kendala akses transportasi dan biaya yang harus ditanggung keluarga untuk mobilitas anak ke sekolah setiap hari. Dengan demikian, Program ASG memiliki potensi strategis untuk meningkatkan APM terutama pada jenjang SMP dan SMA jika dapat diperluas cakupannya untuk menjangkau lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil yang selama ini terkendala masalah transportasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

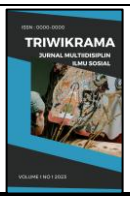
Aspek keberlanjutan Program ASG juga perlu mendapat perhatian serius mengingat program ini sangat bergantung pada komitmen anggaran daerah yang harus dialokasikan secara konsisten setiap tahun. Fluktuasi jumlah penumpang yang tercatat dalam data periode Januari-Juni 2025, dimana capaian tertinggi pada Januari dengan 6.272 penumpang menurun menjadi 4.463 penumpang pada Juni, menunjukkan adanya variasi tingkat pemanfaatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti periode libur sekolah, ujian akhir semester, dan penyesuaian jadwal pembelajaran. Pola fluktuasi ini perlu dipahami dengan baik untuk perencanaan operasional yang lebih efisien, dimana pada bulan-bulan dengan tingkat pemanfaatan rendah dapat dilakukan pemeliharaan armada atau rotasi kendaraan, sementara pada bulan dengan pemanfaatan tinggi perlu disiapkan armada cadangan yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis (ASG) oleh Pemerintah Kota Madiun dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan bagi Pelajar, dapat disimpulkan bahwa program ini BERHASIL memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan operasional yang memerlukan perhatian serius untuk optimalisasi ke depan. Keberhasilan program ini dapat dibuktikan dari beberapa aspek fundamental yang menunjukkan dampak konkret di lapangan. Pertama, dari aspek cakupan layanan dan aksesibilitas, Program ASG telah berhasil melayani rata-rata 5.646 penumpang per bulan pada periode Januari-Juni 2025 dengan mengoperasikan 20 unit armada yang terdiri dari 3 unit Bus Sekolah berkapasitas 25 penumpang, 2 unit Elf Sekolah berkapasitas 19 penumpang, dan 15 unit Angkutan Kota berkapasitas 12 penumpang. Meskipun angka ini belum mencakup seluruh siswa di Kota Madiun yang mencapai 36.370 siswa SD dan 17.000 siswa SMP pada tahun 2023, program ini telah memberikan solusi transportasi konkret bagi ribuan pelajar yang sebelumnya kesulitan mengakses sekolah karena keterbatasan ekonomi atau jarak tempuh yang jauh, sehingga membuktikan bahwa program ini mampu menjawab kebutuhan mendesak akan transportasi pendidikan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kedua, dari aspek dampak sosial dan pendidikan, Program ASG terbukti memberikan dampak positif yang terukur dan dirasakan langsung oleh berbagai pihak, termasuk meningkatnya kedisiplinan dan kehadiran siswa yang dirasakan langsung

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

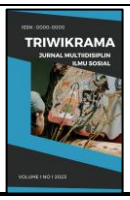


oleh guru dan pihak sekolah sehingga memudahkan proses pembelajaran, menurunnya angka keterlambatan pelajar yang sebelumnya sering terjadi karena ketergantungan pada transportasi pribadi atau umum yang tidak teratur, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di bawah umur terutama yang sebelumnya menggunakan sepeda motor tanpa SIM atau kendaraan tidak layak, serta menumbuhkan budaya disiplin dalam berangkat dan pulang sekolah tepat waktu karena jadwal ASG yang terstruktur dan konsisten. Ketiga, dari aspek dampak ekonomi bagi keluarga, Program ASG secara nyata membantu keluarga mengurangi pengeluaran harian untuk transportasi anak, dimana sebelum adanya program ini orang tua harus mengeluarkan biaya bensin atau ongkos ojek setiap hari untuk mengantar dan menjemput anak, namun dengan adanya ASG yang gratis beban finansial tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti pembelian buku, kebutuhan sekolah, atau kebutuhan pokok keluarga, sehingga memberikan dampak multiplier effect terhadap kesejahteraan keluarga pelajar terutama mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan menjadi bukti nyata bahwa program ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keempat, dari aspek dukungan stakeholder, program ini mendapat legitimasi dan penerimaan yang luas dari berbagai pihak termasuk guru yang merasakan dampak positif berupa peningkatan kedisiplinan dan kehadiran siswa, orang tua yang merasa lebih aman dan tidak terbebani biaya antar-jemput anak, masyarakat umum yang menilai program ini sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta dukungan politik yang konsisten melalui penerbitan Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis yang memberikan landasan hukum kuat bagi keberlanjutan program dan memastikan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara konsisten untuk pembiayaan operasional, pemeliharaan armada, dan pelatihan sopir.

Secara keseluruhan, implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis di Kota Madiun dapat dinyatakan BERHASIL dalam menjawab kebutuhan mendesak akan transportasi pendidikan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi pelajar, serta memberikan dampak positif yang terukur terhadap peningkatan kedisiplinan, kehadiran, dan keselamatan pelajar, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga pelajar terutama dari kalangan menengah ke bawah. Keberhasilan ini dibuktikan melalui cakupan layanan yang telah menjangkau ribuan penumpang per bulan, dukungan stakeholder yang luas, dampak sosial dan pendidikan yang nyata, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh keluarga pelajar. Namun, untuk benar-benar mewujudkan aksesibilitas pendidikan yang merata dan inklusif sesuai dengan visi awal kebijakan, diperlukan upaya sistematis dan terencana untuk mengatasi tantangan-tantangan struktural yang masih ada, terutama terkait perluasan kapasitas armada agar dapat menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah terpencil, perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data, pengembangan Standar Operasional Prosedur yang spesifik untuk angkutan sekolah yang mempertimbangkan karakteristik khusus penumpang anak-anak, serta optimalisasi skema pembiayaan program melalui penerapan subsidi berbasis ATP atau WTP agar lebih efisien dan berkelanjutan tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan, sehingga program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pelajar di Kota Madiun dalam jangka panjang.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

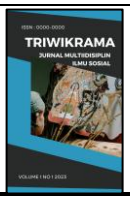
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan efektivitas Program Angkutan Sekolah Gratis di Kota Madiun. Pertama, Pemerintah Kota Madiun perlu memprioritaskan penambahan armada secara bertahap melalui alokasi APBD atau skema kemitraan dengan pihak swasta (Public Private Partnership) untuk mengatasi kesenjangan kapasitas layanan, terutama di wilayah pinggiran dan daerah terpencil yang saat ini belum terjangkau. Kedua, perlu dilakukan optimalisasi skema pembiayaan melalui penerapan sistem subsidi berbasis kemampuan ekonomi keluarga (Ability to Pay), dimana keluarga mampu dapat memberikan kontribusi biaya yang terjangkau sementara keluarga kurang mampu tetap mendapatkan layanan gratis penuh, sehingga penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk perluasan cakupan program. Ketiga, Dinas Perhubungan bersama Dinas Pendidikan perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk layanan angkutan sekolah, mencakup standar kualifikasi sopir, prosedur penjemputan dan pengantaran siswa yang aman, mekanisme koordinasi dengan sekolah dan orang tua, serta protokol penanganan situasi darurat. Keempat, sistem monitoring dan evaluasi program harus diperkuat melalui pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi yang dapat memantau kinerja program secara real-time, memperbaiki aplikasi tracking ASG yang saat ini masih bermasalah, serta melakukan evaluasi berkala dengan indikator yang jelas dan terukur seperti tingkat ketepatan waktu, kepuasan pengguna, dan dampak terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan. Kelima, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program ASG yang melibatkan perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, sekolah, organisasi orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan program dan menampung aspirasi pengguna secara langsung. Keenam, sosialisasi program harus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan dan dukungan masyarakat. Ketujuh, pengembangan inovasi layanan seperti sistem pemesanan online, integrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, serta program penghargaan bagi siswa disiplin perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik program. Terakhir, perlu dilakukan kajian dampak jangka panjang program terhadap indikator pendidikan makro dan kesejahteraan masyarakat untuk memastikan program memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi model kebijakan transportasi pendidikan yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DAFTAR PUSTAKA

Alvord, J. (2012). *Public Transportation Systems: Principles of Planning, Operation, and Design*. McGraw-Hill Education.

Anggraeni, F. (2023). *Efektivitas Program Angkutan Sekolah Gratis dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Wilayah Sub-Urban*.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Sekitar 20\% Anak Usia Sekolah Mengalami Kendala Akses Pendidikan*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. (2025). *Kabupaten Madiun Dalam Angka 2025*. Diakses pada 28 Agustus 2025, dari https://madiunkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5fa1b64c09245c71efe8c0b6/kabupaten-madiun-dalam-angka-2025.html

Dinas Perhubungan Kota Madiun. (2019). *Pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis di Kota Madiun*.

Jones, P. (2018). Public School Bus Services and Education Accessibility in Rural Australia.

Transport Policy. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.02.007

Kim, Y. (2020). School Transport Policy Impact on Student Safety in South Korea. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2020.01.112
Permatasari, L. (2020). *Manfaat Program Transportasi Sekolah dalam Menurunkan Angka Putus Sekolah*.

Prasetyo, A. (2022). *Strategi Pemerintah Kota Madiun dalam Implementasi ASG*.
Putri, A. S. (2020). *Dampak Layanan Transportasi Sekolah Terhadap Akses Pendidikan di Daerah Perdesaan*.

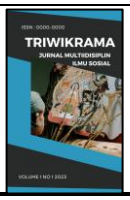
Ristiawan, D. (2021). *Evaluasi Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Banyumas*.

Sari, M. (2021). *Kendala Pelaksanaan Bus Sekolah di Kabupaten Jember*.

Wang, L., & Zhao, M. (2019). The Role of Free School Buses in Reducing Educational Inequality in China. *Urban Studies Journal*. https://doi.org/10.1177/0042098018777410

Wardana, Y. (2019). *Implementasi Bus Sekolah Gratis di Kota Surabaya*.
Afifuddin. (2021). INOVASI DAN KREATIVITAS PUBLIC SERVICE DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI MODERN LOCAL GOVERNMENT. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *4*(2), 175–192.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Urnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, *4*(1), 309–317.

Akhyar. (2023). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: SUATU TINJAUAN MENGENAI KEPUASAN MASYARAKAT. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi*, *6*(2).
Alvord, J. (2012). *Public Transportation Systems: Principles of Planning, Operation, and Design*. McGraw-Hill Education.

Anastasya, R., & Putri, S. B. (2024). SDGs 7: Efektivitas Program Penggunaan Bus Listrik Guna Mendorong Transportasi Publik Ramah Lingkungan. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, *1*(3), 13. https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.343

Angglepi, M., Susanti, E., Haironi, N., & Assyifaturrahmah. (2025). TANTANGAN MOBILITAS PELAJAR DI SEBRANG SUNGAI KAMPAR KIRI DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN. *Edusola : Journal Education, Sociology and Law*, *1*(1).

Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444
Apdhi, W., Menciptakan, Y., Governance, G., Inovasi, M., Publik, P., Kota, D., Analisa, S., & Yohanitas, W. A. (2016). *CREATING GOOD GOVERNANCE THROUGH INNOVATION IN PUBLIC SERVICE AT SURAKARTA MUNICIPALITY*.

Aziz, A. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *TheJournalish: Social and Government*, *5*(3), 298–305. https://doi.org/10.55314/tsg.v5i3.795

Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, *4*(2), 192. https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575

Azizah, N., Sa'dah, L., & Firdausiyah, N. A. (2024). Tantangan dan Peluang MPAI (Model Pembelajaran Adaptif dan Inklusif) di Sekolah Dasar: Menyongsong Pendidikan Inklusif di Era

Digital. *ELEMENTARY PEDAGOGIA*, *1*(3). https://doi.org/10.62387/elementarypedagogia.v1i3.51

Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D. (2025). *Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata.* (Vol. 1, Issue 1).

Budi, E., Walici, S. K., Zakipradi, L., Gede, W., & Haryaka, U. (2025). IMPLIKASI EKONOMI